

OLIGARKI DAN KONFLIK KEPENTINGAN DALAM PEMBENTUKAN REGULASI PUBLIK: TELAAH SOSIO-POLITIK TERHADAP RELASI KEKUASAAN DI INDONESIA

Iskandar Syukur

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia

Email: issyukur@yahoo.com

ABSTRAK

Proses pembentukan regulasi publik di Indonesia tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal yang ditentukan oleh sistem pemerintahan, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan antarpihak yang memiliki kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda. Dalam pelaksanaannya, proses penyusunan kebijakan sering memperlihatkan adanya keterlibatan berbagai aktor dengan kapasitas yang tidak seimbang dalam mengakses ruang pengambilan keputusan, sehingga menciptakan perbedaan kemampuan dalam memengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan. Kondisi tersebut memunculkan perhatian terhadap kemungkinan berkembangnya konflik kepentingan dalam proses penyusunan regulasi yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas kebijakan publik serta penyelenggaraan pemerintahan secara lebih luas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh relasi kekuasaan dalam proses pembentukan regulasi publik di Indonesia dengan menelaah hubungan antara oligarki dan konflik kepentingan dalam proses kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui pengumpulan data yang berasal dari berbagai literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta sumber lain yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembentukan regulasi publik melibatkan hubungan yang kompleks antara berbagai aktor dengan tingkat pengaruh yang berbeda dalam memengaruhi arah kebijakan. Relasi kekuasaan yang berkembang dalam proses tersebut dapat memunculkan kondisi yang menyebabkan sebagian kepentingan memperoleh akses yang lebih besar terhadap proses pengambilan keputusan dibandingkan kepentingan lainnya. Keadaan tersebut memiliki implikasi terhadap kualitas regulasi, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, pelaksanaan prinsip akuntabilitas, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam jangka panjang.

Kata Kunci: Oligarki, Konflik Kepentingan, Regulasi Publik, Relasi Kekuasaan, Kebijakan Publik.

ABSTRACT

The process of formulating public regulations in Indonesia proceeds not only through formal mechanisms determined by the government system but is also influenced by relationships between parties with varying interests and levels of influence. In practice, the policymaking process often involves various actors with unequal access to decision-making space, creating differences in their ability to influence the direction of the resulting policy. This situation raises concerns about the potential for conflicts of interest to develop in the regulatory process, which could ultimately impact the quality of public policy and governance more broadly. This study aims to analyze the influence of power relations on the process of formulating public regulations in Indonesia by examining the relationship between oligarchy and conflicts of interest in the policy process. This study uses a qualitative approach with a literature review method through data collection from various literature, previous research results, scientific articles, and other sources relevant to the research focus. The results indicate that the process of formulating public regulations involves complex relationships between various actors with varying levels of influence in influencing policy direction. The power relations that develop in this process can create conditions that cause some interests to gain greater access to the decision-making process than others. This situation has implications for the quality of regulations, the level of public trust in state institutions, the implementation of accountability principles, and the long-term effectiveness of governance.

Keywords: Oligarchy, Conflict of Interest, Public Regulation, Power Relations, Public Policy.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem politik Indonesia setelah reformasi menghadirkan perubahan

besar terhadap tata kelola pemerintahan dan mekanisme pembentukan kebijakan publik. Perubahan tersebut ditandai oleh

terbukanya ruang partisipasi politik, meningkatnya kebebasan berpendapat, berkembangnya sistem multipartai, serta munculnya berbagai institusi yang dirancang untuk memperkuat prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara. Pada fase awal perubahan politik tersebut, terdapat harapan yang cukup besar bahwa proses penyusunan kebijakan akan semakin terbuka dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Sistem yang sebelumnya dipandang cenderung terpusat mulai bergerak menuju pola yang lebih partisipatif dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Situasi tersebut pada awalnya dipandang sebagai langkah penting dalam membangun tata pemerintahan yang lebih demokratis serta menciptakan hubungan yang lebih seimbang antara negara dan masyarakat (Mandasari, 2023).

Namun demikian, perjalanan demokrasi Indonesia menunjukkan dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan harapan awal tersebut. Seiring dengan berkembangnya proses politik dan meningkatnya intensitas persaingan dalam berbagai arena kekuasaan, muncul kecenderungan menguatnya pengaruh kelompok-kelompok tertentu dalam menentukan arah kebijakan publik. Dalam berbagai situasi, proses pembentukan regulasi tidak hanya berlangsung melalui mekanisme formal yang telah ditentukan oleh sistem ketatanegaraan, melainkan juga dipengaruhi oleh hubungan-hubungan yang berkembang di luar prosedur resmi. Kehadiran aktor-aktor dengan kapasitas sumber daya yang besar sering kali memperlihatkan kemampuan yang lebih tinggi dalam mengakses proses pengambilan keputusan dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya. Akibatnya, ruang kebijakan menjadi arena yang mempertemukan berbagai kepentingan yang saling bersaing dengan tingkat pengaruh yang tidak selalu seimbang (Pulungan & Alw, 2022).

Pada perkembangan berikutnya, berbagai kebijakan strategis di Indonesia kerap memunculkan perdebatan yang cukup luas di tengah masyarakat. Perdebatan tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh

substansi kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan proses pembentukannya. Tidak sedikit regulasi yang sejak awal mendapatkan respons kritis dari masyarakat karena dianggap lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu dibandingkan dengan kebutuhan publik secara umum. Munculnya berbagai kritik terhadap proses penyusunan kebijakan menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai hasil akhir suatu regulasi, tetapi juga memperhatikan bagaimana kebijakan tersebut dibentuk, siapa saja yang terlibat di dalamnya, serta kepentingan apa yang kemungkinan berada di balik proses tersebut (Septiana et al., 2023).

Fenomena tersebut semakin terlihat ketika berbagai keputusan strategis yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat justru memunculkan pertanyaan mengenai keberpihakan negara terhadap kepentingan publik. Dalam berbagai kasus, muncul anggapan bahwa kebijakan tertentu cenderung memberikan manfaat yang lebih besar kepada kelompok dengan akses politik dan ekonomi yang kuat. Kondisi demikian memunculkan persepsi bahwa terdapat ketidakseimbangan dalam proses distribusi pengaruh di dalam sistem politik. Sementara sebagian kelompok memiliki kemampuan untuk menjangkau pusat-pusat pengambilan keputusan, kelompok lainnya menghadapi keterbatasan dalam menyampaikan aspirasi maupun memengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan (Padilah et al., 2023).

Situasi tersebut menjadi semakin penting untuk diperhatikan karena pembentukan regulasi pada dasarnya merupakan bagian yang sangat menentukan dalam proses penyelenggaraan negara. Regulasi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga menjadi dasar bagi pelaksanaan berbagai program pembangunan, pengelolaan sumber daya, distribusi kesejahteraan, serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Ketika proses pembentukan regulasi dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang tidak seimbang, maka dampaknya tidak hanya berhenti pada substansi kebijakan semata, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan secara keseluruhan (Rosmidah et al., 2023).

Dalam konteks Indonesia, hubungan antara kekuasaan politik dan kepentingan ekonomi telah menjadi salah satu isu yang terus memperoleh perhatian dalam berbagai diskursus publik. Hubungan tersebut berkembang melalui berbagai bentuk interaksi yang berlangsung dalam proses politik, mulai dari pembiayaan aktivitas politik, dukungan terhadap aktor-aktor tertentu, hingga keterlibatan berbagai kelompok dalam proses penyusunan kebijakan. Di tengah meningkatnya kebutuhan sumber daya dalam aktivitas politik modern, hubungan antara kekuatan ekonomi dan struktur kekuasaan sering kali menjadi semakin erat. Situasi ini kemudian menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya dominasi pengaruh oleh kelompok tertentu terhadap arah kebijakan negara (Aliano & Adon, 2023).

Pada saat yang sama, dinamika politik Indonesia memperlihatkan bahwa kontestasi kekuasaan tidak hanya berlangsung pada tingkat persaingan antarkelompok politik, tetapi juga melibatkan jaringan hubungan yang lebih luas antara aktor negara, pelaku ekonomi, serta berbagai kepentingan lainnya. Relasi yang terbentuk di antara berbagai aktor tersebut sering kali menghasilkan konfigurasi kekuasaan yang kompleks dan sulit dipahami hanya melalui pendekatan formal kelembagaan. Berbagai keputusan strategis yang dihasilkan dalam proses politik sering kali dipengaruhi oleh hubungan-hubungan yang berkembang secara informal dan berlangsung di luar ruang publik (Jumadin & Wibisono, 2019).

Meningkatnya perhatian terhadap proses pembentukan regulasi juga dipengaruhi oleh munculnya berbagai kritik dari masyarakat sipil, akademisi, maupun kelompok-kelompok yang bergerak dalam bidang pengawasan kebijakan publik. Berbagai kritik tersebut pada umumnya menyoroti adanya ketidaksesuaian antara kepentingan masyarakat dengan arah kebijakan yang dihasilkan. Selain itu, muncul pula kekhawatiran mengenai terbatasnya transparansi dalam proses penyusunan regulasi, terutama pada kebijakan yang memiliki konsekuensi besar terhadap masyarakat luas. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan dalam

pembentukan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan substansi aturan, tetapi juga menyangkut persoalan relasi kekuasaan yang memengaruhi proses pembentukannya (Hermanto, 2023).

Kondisi ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka dan akuntabel. Perkembangan teknologi informasi telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memantau berbagai proses politik dan kebijakan. Informasi yang sebelumnya sulit diakses kini dapat diperoleh dengan lebih cepat sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah. Di sisi lain, keterbukaan informasi tersebut juga memperlihatkan bahwa proses pembentukan regulasi sering kali melibatkan dinamika yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan yang terlihat pada permukaan (Rahim et al., 2023).

Perubahan pola hubungan antara masyarakat dan negara tersebut telah mendorong meningkatnya kesadaran publik terhadap pentingnya proses pengambilan kebijakan yang lebih transparan. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi objek dari kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga semakin aktif mempertanyakan proses serta aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan dalam pola interaksi politik yang berkembang di Indonesia, di mana legitimasi kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh kewenangan formal institusi negara, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap proses yang melahirkannya (Noor, 2019).

Di sisi lain, berbagai dinamika politik yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa pengaruh kelompok-kelompok tertentu terhadap proses kebijakan tetap menjadi isu yang terus muncul dalam berbagai pembahasan publik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa perubahan sistem politik tidak secara otomatis menghilangkan ketimpangan pengaruh dalam struktur kekuasaan. Meskipun berbagai mekanisme demokratis telah dibangun, distribusi akses terhadap

proses pengambilan keputusan masih menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antaraktor. Sebagian pihak memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan, sementara sebagian lainnya menghadapi berbagai keterbatasan untuk memperoleh akses yang setara (Ardipandanto, 2020).

Apabila kondisi tersebut terus berlangsung, maka terdapat potensi munculnya berbagai persoalan yang lebih luas terhadap kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan. Ketimpangan pengaruh dalam proses pembentukan regulasi dapat memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi negara, menurunkan legitimasi kebijakan, serta memperbesar jarak antara kepentingan masyarakat dengan keputusan yang dihasilkan pemerintah. Dalam jangka panjang, situasi demikian dapat memengaruhi efektivitas kebijakan publik dan menghambat upaya mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif (Syahrul, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh relasi kekuasaan dalam proses pembentukan regulasi publik di Indonesia dengan menelaah keterkaitan antara oligarki dan konflik kepentingan yang berkembang dalam arena kebijakan publik. Penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi bagaimana berbagai kepentingan yang muncul dalam struktur politik dapat memengaruhi proses penyusunan regulasi, serta mengkaji pola hubungan yang terbentuk antara aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami implikasi dari dinamika relasi kekuasaan tersebut terhadap kualitas kebijakan publik, penyelenggaraan pemerintahan, serta berbagai konsekuensi yang dapat muncul terhadap hubungan antara negara dan masyarakat dalam konteks sosial dan politik di Indonesia.

KAJIAN TINJAUAN PUSTAKA

Konflik Kepentingan

Tindak pidana korupsi (tipikor) dapat muncul akibat berbagai faktor, salah satunya berkaitan dengan konflik kepentingan

(conflict of interest). Apabila tidak dikelola secara tepat, konflik kepentingan berpotensi memicu terjadinya korupsi serta menimbulkan kerugian bagi negara. Oleh sebab itu, penting untuk memahami makna konflik kepentingan beserta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi tersebut (Bakker et al., 2021).

Konflik kepentingan dapat diartikan sebagai keadaan ketika pejabat publik mempunyai kepentingan pribadi atau kepentingan lain yang memengaruhi, maupun dipandang memengaruhi, pelaksanaan tugas publik yang semestinya dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Berdasarkan pengertian tersebut, seorang pejabat seharusnya bersikap netral dalam mengambil keputusan serta menjalankan tugas secara penuh tanpa adanya pengaruh atau keterikatan dengan kepentingan lain (Saputra et al., 2019).

Definisi mengenai konflik kepentingan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (14) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Konflik Kepentingan, yang menjelaskan bahwa konflik kepentingan merupakan: "kondisi Pejabat Pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain dalam penggunaan Wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat dan/atau dilakukannya".

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2016, konflik kepentingan diartikan sebagai: "Situasi di mana Penyelenggara negara memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya".

Pelanggaran yang timbul akibat konflik kepentingan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dapat dikenai sanksi administratif dengan tingkatan yang bervariasi, mulai dari kategori ringan hingga berat.

Sanksi administratif ringan dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis,

maupun penundaan kenaikan pangkat, golongan, dan/atau hak-hak jabatan. Jenis sanksi ini diberikan kepada Pejabat Pemerintahan apabila yang bersangkutan tidak melaporkan kepada atasan ketika terdapat konflik kepentingan. Selain itu, sanksi administratif ringan juga dapat dikenakan kepada atasan yang tidak mengambil tindakan atau keputusan atas laporan konflik kepentingan paling lambat lima hari kerja sejak laporan tersebut diterima (Ericson, 2022).

Di sisi lain, sanksi administratif berat dikenakan apabila pejabat atau pegawai tetap mengambil keputusan maupun tindakan yang mengandung potensi konflik kepentingan. Bentuk sanksi tersebut dapat berupa pemberhentian secara tetap dengan atau tanpa hak keuangan, maupun publikasi pelanggaran tersebut melalui media massa (Nafis, 2020).

Regulasi

Regulasi dapat dipahami sebagai segala hal yang berkaitan dengan seperangkat aturan atau norma yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengatur serta mengawasi aktivitas individu, organisasi, maupun berbagai kegiatan dalam sektor tertentu di lingkungan masyarakat. Sementara itu, dalam sektor publik, regulasi menjadi salah satu instrumen utama yang dimiliki pemerintah dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian guna melindungi serta mewujudkan kepentingan masyarakat secara luas. Dalam perspektif historis, perkembangan regulasi pada sektor publik mengalami perubahan yang cukup besar. Pada abad ke-19, pendekatan *laissez-faire* yang menekankan minimnya campur tangan pemerintah menjadi pendekatan yang dominan. Akan tetapi, seiring terjadinya krisis ekonomi besar pada tahun 1930-an, paradigma tersebut mulai mengalami perubahan akibat berkembangnya teori Keynesian yang lebih mengakomodasi keterlibatan aktif pemerintah dalam pengelolaan ekonomi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya periode perluasan regulasi (*expanded regulation*) yang bertujuan mengatasi kegagalan pasar (*market failures*) sekaligus

menghadirkan bentuk perlindungan baru bagi konsumen (Putra, 2020).

Memasuki periode tahun 1970–1980-an, terjadi perubahan arah menuju kebijakan deregulasi dan privatisasi, terutama di berbagai negara Barat. Perubahan tersebut banyak dipengaruhi oleh berkembangnya teori neoliberal economics. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama karena dunia kemudian menghadapi krisis keuangan global pada tahun 2008. Situasi tersebut memperkuat pandangan yang mendukung penerapan regulasi yang lebih ketat, khususnya pada sektor keuangan. Memasuki era modern, regulasi sektor publik kemudian dihadapkan pada berbagai tantangan baru yang lebih kompleks, seperti berkembangnya ekonomi digital, meningkatnya dampak globalisasi, serta berbagai persoalan lingkungan. Keadaan tersebut mendorong munculnya pendekatan *smart regulation* yang ditandai dengan penggunaan serta penggabungan berbagai instrumen regulasi konvensional secara lebih adaptif (Sukmayana, 2023).

Di negara-negara berkembang, regulasi sektor publik kerap menghadapi berbagai tantangan dalam proses penerapannya. Salah satu perkembangan terbaru dalam teori regulasi adalah konsep *regulatory governance* atau tata kelola regulasi yang menekankan pentingnya prinsip transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dalam pelaksanaan proses pengaturan. Selain itu, pendekatan *evidence-based regulation* juga semakin banyak diterapkan, di mana kebijakan dan pedoman regulasi disusun berdasarkan data empiris serta analisis terhadap efektivitas penerapan regulasi (harinurdin & Safitri, 2023).

Perkembangan teknologi digital turut mendorong munculnya konsep *regulatory technology* yang memanfaatkan inovasi teknologi guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pengaturan. Penerapan konsep ini mencakup penggunaan *big data*, kecerdasan buatan, serta teknologi *blockchain* dalam pelaksanaan maupun implementasi berbagai regulasi (Rini, 2019). Beberapa tantangan utama dalam pengembangan regulasi sektor publik modern meliputi upaya mengatasi asimetri informasi, mengurangi beban regulasi, menangani risiko sistemik, serta

memastikan bahwa regulasi yang diterapkan tetap mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang berlangsung secara cepat dalam kehidupan masyarakat dan dunia usaha (Nugroho et al., 2023).

Regulasi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern. Dalam konteks Indonesia, regulasi memiliki peranan yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjamin akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya negara. Menurut Jimly Asshiddiqie, regulasi merupakan keseluruhan sistem peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam sektor publik, regulasi berfungsi sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengelolaan sumber daya negara. Sementara itu, Philip M. Hadjon menyatakan bahwa regulasi sektor publik merupakan perangkat yuridis yang digunakan pemerintah untuk mengatur serta mengawasi pelaksanaan urusan publik guna mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat (Indriastuti, 2020).

Relasi Kekuasaan

Relasi kuasa merupakan hubungan yang terbentuk di antara aktor-aktor tertentu yang memiliki kepentingan dengan tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Di dalam relasi kuasa terdapat unsur kekuatan dalam hubungan sosial, yaitu kemampuan seorang aktor untuk memengaruhi maupun mengubah perilaku aktor lainnya. Dengan kata lain, unsur kekuasaan mempunyai peranan dalam membentuk suatu program atau kegiatan sesuai dengan kepentingan pihak tertentu, bahkan ketika terdapat penolakan atau perlawanan dari aktor lain. Menurut konsep yang dikemukakan oleh Michael Foucault, kekuasaan dipahami sebagai suatu dimensi sekaligus relasi, sehingga di setiap relasi akan selalu terdapat unsur kekuasaan di dalamnya. Oleh karena itu, isu relasi kuasa senantiasa menjadi bagian yang mendasari berbagai proses politik, baik pada tingkat individu maupun kelompok (Puspitasati & Ruwaida, 2021).

Politik dipahami sebagai proses yang berkaitan dengan kekuasaan, di mana hubungan kekuasaan merupakan bentuk praktik antara subjek dan objek melalui berbagai media. Bentuk kekuasaan yang dimaksud tidak diperoleh melalui cara-cara hegemonik maupun manipulatif. Kekuasaan bukan dipandang sebagai suatu kepemilikan, melainkan sebagai strategi yang berkaitan dengan praktik-praktik yang berlangsung di dalam suatu lembaga. Selain itu, kekuasaan juga dipahami sebagai kapasitas yang dimiliki individu atau kelompok tertentu untuk membentuk tindakan individu atau kelompok lain agar selaras dengan tujuan serta kepentingan pihak yang memiliki otoritas. Kemampuan untuk memengaruhi kebijakan publik maupun kebijakan pemerintah dikenal sebagai kekuatan politik (Afkhar & Rery, 2020).

Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan menjelaskan bahwa kekuasaan merupakan hubungan ketika seseorang atau sekelompok orang mempunyai kemampuan untuk menentukan bagaimana individu atau kelompok lain bertindak demi tercapainya tujuan pihak pertama. Berdasarkan pengertian tersebut, kekuasaan dapat dimaknai sebagai kapasitas untuk memberikan pengaruh kepada individu maupun kelompok tertentu agar menghasilkan tindakan atau hasil yang sesuai dengan tujuan pihak yang memiliki kekuasaan (Cahyono et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara oligarki, konflik kepentingan, dan proses pembentukan regulasi publik di Indonesia. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada upaya menelaah berbagai fenomena sosial dan politik yang berkembang dalam proses pembentukan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan pola relasi kekuasaan serta pengaruh berbagai aktor dalam proses pengambilan keputusan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai berbagai faktor

yang memengaruhi pembentukan regulasi publik serta berbagai implikasi yang muncul terhadap tata kelola pemerintahan. Data penelitian akan diperoleh melalui berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian, baik berupa hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, buku, dokumen kebijakan, maupun berbagai literatur lain yang relevan dengan pembahasan penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan untuk memperoleh informasi yang mendukung proses analisis terhadap objek penelitian. Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan, tahapan selanjutnya dilakukan melalui proses pengolahan dan analisis data secara sistematis agar berbagai informasi yang diperoleh dapat disusun secara terstruktur sehingga penelitian ini mampu menghasilkan temuan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan (Rukin, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Relasi Kekuasaan dalam Proses Pembentukan Regulasi Publik

Proses pembentukan regulasi publik di Indonesia memperlihatkan adanya hubungan kekuasaan yang terbentuk melalui keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan kebijakan, sehingga proses tersebut tidak berlangsung secara sepenuhnya netral maupun hanya bergantung pada mekanisme formal yang telah ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan. Di balik berbagai tahapan penyusunan regulasi, terdapat hubungan yang kompleks di antara berbagai aktor yang memiliki kepentingan berbeda-beda serta berupaya memengaruhi arah keputusan yang akan dihasilkan. Proses tersebut pada akhirnya membentuk suatu konfigurasi hubungan yang tidak hanya melibatkan lembaga negara sebagai pembentuk kebijakan, tetapi juga melibatkan pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap substansi regulasi yang sedang disusun. Keberadaan berbagai kepentingan tersebut menciptakan pola interaksi yang memperlihatkan bahwa proses kebijakan publik sering kali berkembang sebagai arena pertemuan berbagai kekuatan yang berupaya memperjuangkan tujuan masing-masing.

Dalam konteks pembentukan regulasi publik, hubungan antara aktor politik dan kepentingan tertentu memperlihatkan kecenderungan yang cukup kuat dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan. Aktor politik yang menempati posisi strategis memiliki kapasitas yang besar dalam menentukan arah pembahasan suatu kebijakan karena mereka berada pada posisi yang memungkinkan untuk mengatur prioritas, menetapkan agenda, serta menentukan ruang pembicaraan yang dianggap penting. Akan tetapi, aktor politik tersebut tidak bekerja dalam ruang yang terpisah dari berbagai pengaruh eksternal. Dalam banyak situasi, hubungan yang terbangun antara aktor politik dengan berbagai kelompok kepentingan memperlihatkan adanya proses saling memengaruhi yang berlangsung secara terus-menerus. Hubungan tersebut dapat muncul melalui dukungan politik, hubungan ekonomi, kedekatan sosial, maupun jaringan kekuasaan yang telah terbentuk dalam waktu yang cukup panjang.

Keterkaitan antara aktor politik dan berbagai kepentingan sering kali berkembang melalui hubungan yang bersifat timbal balik. Aktor politik membutuhkan dukungan untuk mempertahankan posisi dan memperluas pengaruhnya, sementara kelompok yang memiliki sumber daya tertentu memerlukan akses terhadap pusat-pusat pengambilan keputusan agar kepentingannya dapat terakomodasi dalam kebijakan yang sedang disusun. Hubungan semacam ini menciptakan ruang interaksi yang tidak selalu dapat diamati melalui prosedur formal. Dalam beberapa situasi, proses tersebut dapat berlangsung melalui komunikasi yang tidak tercatat secara administratif, pertemuan yang tidak menjadi bagian dari agenda resmi, atau jaringan hubungan personal yang berkembang di luar mekanisme kelembagaan. Akibatnya, proses pembentukan regulasi sering kali tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan administratif dan kebutuhan publik semata, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan-hubungan yang berkembang di antara berbagai aktor tersebut.

Keadaan tersebut selanjutnya berkaitan dengan distribusi pengaruh dalam proses pengambilan keputusan. Distribusi

pengaruh pada dasarnya tidak tersebar secara merata di antara seluruh aktor yang terlibat dalam proses kebijakan. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan mengenai kemampuan masing-masing pihak dalam memengaruhi arah regulasi yang akan dihasilkan. Sebagian aktor memiliki posisi yang lebih kuat karena didukung oleh sumber daya yang lebih besar, baik dalam bentuk kekuatan ekonomi, kedudukan politik, akses terhadap informasi, maupun jaringan hubungan yang luas. Di sisi lain, terdapat pula kelompok yang memiliki keterbatasan dalam memperoleh akses terhadap proses pengambilan keputusan sehingga pengaruh yang dimiliki menjadi relatif kecil.

Ketimpangan dalam distribusi pengaruh tersebut menciptakan kecenderungan bahwa proses pembentukan kebijakan lebih mudah dipengaruhi oleh kelompok yang memiliki kapasitas besar dibandingkan kelompok dengan sumber daya yang terbatas. Situasi demikian tidak selalu muncul secara terbuka, melainkan sering berkembang melalui mekanisme yang bersifat tidak langsung. Misalnya, kelompok tertentu dapat memengaruhi proses pembahasan kebijakan melalui penyampaian rekomendasi, pemberian masukan, atau keterlibatan dalam forum tertentu yang memiliki hubungan dekat dengan pembuat keputusan. Sementara itu, kelompok lain yang tidak memiliki akses serupa sering kali hanya berada pada posisi sebagai penerima dampak dari kebijakan yang telah dihasilkan.

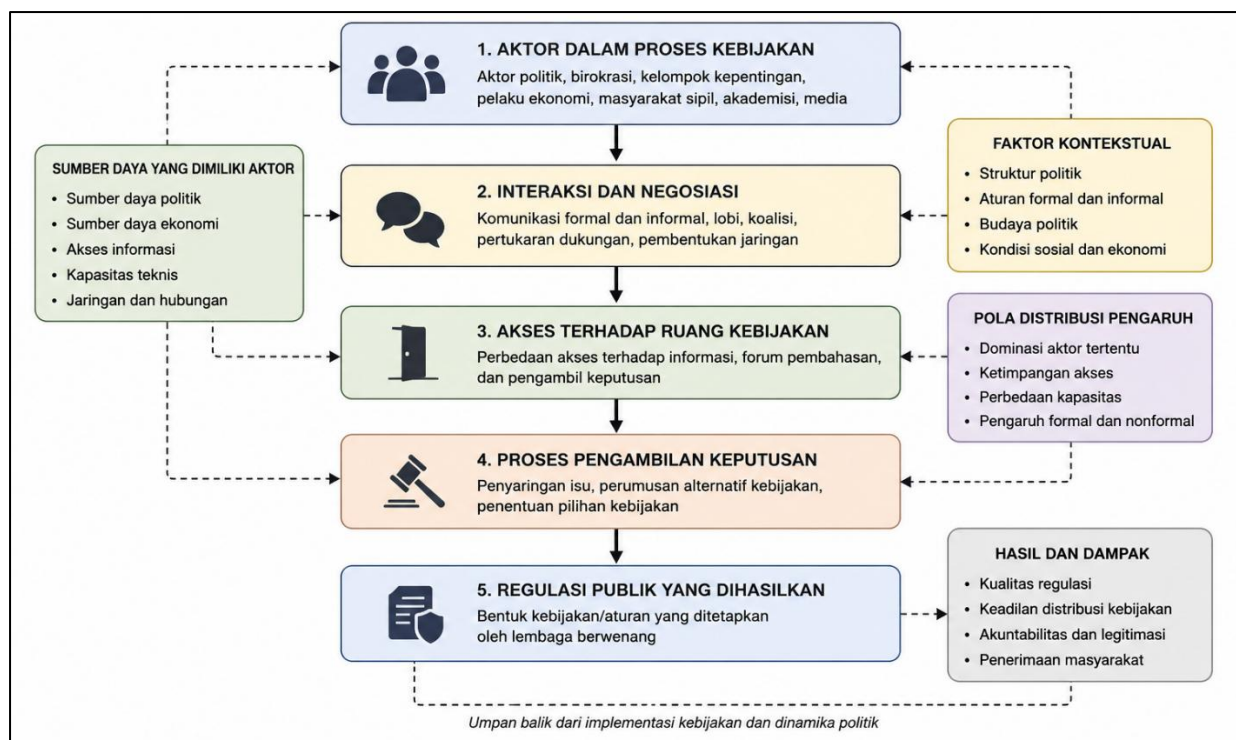
Perbedaan distribusi pengaruh juga memperlihatkan adanya variasi kemampuan antarkelompok dalam mengarahkan proses penyusunan regulasi. Aktor yang memiliki kedudukan strategis serta sumber daya yang besar cenderung lebih mudah mengembangkan jaringan hubungan yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi mereka dalam proses kebijakan. Sebaliknya, kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya sering menghadapi kesulitan dalam membangun akses terhadap proses tersebut. Akibatnya, terdapat

kecenderungan bahwa pengaruh terhadap kebijakan menjadi terkonsentrasi pada kelompok tertentu yang memiliki kemampuan lebih besar dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Keadaan tersebut kemudian berkaitan dengan akses kelompok tertentu terhadap ruang kebijakan. Ruang kebijakan pada dasarnya menjadi arena yang menentukan arah keputusan publik karena di dalamnya berlangsung proses pembahasan, negosiasi, serta pertukaran berbagai kepentingan. Namun demikian, tidak seluruh kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki ruang tersebut. Terdapat pihak-pihak yang memiliki akses lebih luas karena kedekatan dengan struktur kekuasaan, sementara pihak lain menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan keterlibatannya menjadi terbatas.

Akses terhadap ruang kebijakan tidak hanya ditentukan oleh posisi formal seseorang atau kelompok dalam struktur pemerintahan. Dalam banyak keadaan, akses tersebut juga dipengaruhi oleh hubungan sosial, kedekatan politik, jaringan ekonomi, serta kemampuan untuk membangun komunikasi dengan aktor-aktor yang berada di pusat pengambilan keputusan. Situasi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan regulasi tidak sepenuhnya berlangsung melalui mekanisme administratif yang bersifat terbuka, melainkan juga dipengaruhi oleh hubungan-hubungan lain yang berkembang di luar prosedur formal.

Hubungan antara berbagai aktor dalam proses pembentukan regulasi menunjukkan adanya keterkaitan yang tidak berdiri secara terpisah, melainkan membentuk suatu pola hubungan yang saling memengaruhi antara sumber daya, akses terhadap ruang kebijakan, serta proses pengambilan keputusan. Untuk memberikan gambaran yang lebih sistematis mengenai keterhubungan antarkomponen tersebut, pola relasi kekuasaan dalam proses pembentukan regulasi publik dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1. Bagan Alur Pola Relasi Kekuasaan dalam Proses Pembentukan Regulasi Publik

Perbedaan kapasitas antarkelompok dalam memengaruhi kebijakan selanjutnya memperlihatkan adanya ketidakseimbangan yang cukup nyata dalam proses pembentukan regulasi. Kapasitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan kemampuan finansial, tetapi juga mencakup kemampuan mengakses informasi, membangun jaringan politik, menguasai isu tertentu, serta mengembangkan strategi untuk memengaruhi arah pembahasan kebijakan. Kelompok dengan sumber daya yang lebih besar biasanya memiliki kemampuan yang lebih tinggi untuk melakukan berbagai aktivitas yang dapat memperkuat posisi mereka dalam proses pengambilan keputusan.

Sebaliknya, kelompok yang memiliki keterbatasan sumber daya sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam menyampaikan kepentingannya secara efektif. Meskipun secara formal seluruh pihak dapat menyampaikan aspirasi, kemampuan untuk memastikan bahwa aspirasi tersebut memperoleh perhatian yang memadai tidak selalu dimiliki oleh semua kelompok. Keadaan ini memperlihatkan bahwa adanya kesempatan untuk berpartisipasi tidak secara otomatis

menghasilkan pengaruh yang setara dalam proses kebijakan.

Selain berkaitan dengan kapasitas antaraktor, proses pembentukan regulasi juga memperlihatkan hubungan antara institusi formal dan pengaruh nonformal yang berkembang di sekitarnya. Institusi formal memiliki kewenangan dalam melaksanakan proses penyusunan kebijakan melalui mekanisme yang telah ditentukan. Akan tetapi, pelaksanaan kewenangan tersebut sering kali tidak sepenuhnya terlepas dari berbagai pengaruh yang berasal dari luar struktur kelembagaan. Pengaruh nonformal dapat muncul melalui hubungan personal, jaringan politik, kedekatan ekonomi, maupun hubungan-hubungan lain yang berkembang di antara para aktor.

Keberadaan pengaruh nonformal tersebut menunjukkan bahwa proses pembentukan regulasi sering kali dipengaruhi oleh dua jalur yang berjalan secara bersamaan. Di satu sisi terdapat mekanisme formal yang menjadi dasar legal dalam penyusunan kebijakan, sementara di sisi lain terdapat hubungan-hubungan yang berkembang secara informal dan turut memengaruhi arah keputusan yang dihasilkan. Hubungan antara kedua unsur

tersebut menciptakan pola yang memperlihatkan bahwa proses kebijakan tidak hanya ditentukan oleh aturan kelembagaan, tetapi juga oleh konfigurasi hubungan yang berkembang di antara berbagai aktor.

Dalam proses tersebut, bentuk interaksi yang berkembang antarpihak menjadi salah satu aspek yang menentukan arah kebijakan publik. Interaksi tersebut tidak selalu berlangsung dalam bentuk persaingan, tetapi juga dapat berbentuk kerja sama, negosiasi, pertukaran dukungan, maupun pembentukan jaringan hubungan yang bertujuan untuk memperkuat posisi masing-masing pihak. Melalui interaksi tersebut, berbagai aktor berupaya menyesuaikan kepentingannya dengan kondisi yang berkembang sehingga dapat memperoleh hasil yang dianggap menguntungkan.

Pengaruh Kepentingan Elite terhadap Arah Kebijakan Publik

Perumusan kebijakan publik di Indonesia sering kali menunjukkan adanya keterkaitan antara proses pengambilan keputusan dengan peran kelompok elite yang memiliki pengaruh terhadap arah kebijakan yang dihasilkan. Pengaruh kepentingan elite terhadap arah kebijakan publik merupakan salah satu persoalan yang memperoleh perhatian dalam pembahasan mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembentukan regulasi di Indonesia. Kebijakan publik pada dasarnya dibentuk melalui serangkaian tahapan yang melibatkan banyak pihak dengan latar belakang, kepentingan, serta tingkat pengaruh yang berbeda. Dalam proses tersebut, arah kebijakan yang dihasilkan tidak hanya ditentukan oleh kebutuhan administratif negara ataupun tuntutan masyarakat semata, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan yang terbentuk di antara aktor-aktor yang memiliki kemampuan untuk menjangkau ruang pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kebijakan publik tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunannya, terutama ketika terdapat kelompok tertentu yang memiliki kapasitas lebih besar dalam memengaruhi proses tersebut.

Pembentukan kebijakan publik pada dasarnya merupakan proses yang melibatkan berbagai aktor dari beragam latar belakang kepentingan. Keterlibatan tersebut dapat berasal dari institusi negara, organisasi politik, kelompok kepentingan, pelaku ekonomi, organisasi masyarakat, kalangan akademisi, maupun unsur-unsur lain yang memiliki hubungan dengan substansi kebijakan yang sedang dibahas. Setiap aktor memasuki ruang kebijakan dengan tujuan yang tidak selalu sama. Sebagian pihak berupaya mendorong kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, sementara sebagian lainnya memiliki kepentingan yang berkaitan dengan posisi, pengaruh, ataupun keuntungan tertentu yang ingin dicapai melalui kebijakan tersebut. Perbedaan orientasi tersebut pada akhirnya membentuk pola hubungan yang kompleks karena setiap pihak berusaha memperjuangkan kepentingannya melalui berbagai cara yang tersedia.

Keterlibatan berbagai aktor dalam proses pembentukan kebijakan juga menunjukkan bahwa ruang kebijakan merupakan arena yang dipenuhi oleh proses interaksi yang berlangsung secara terus-menerus. Interaksi tersebut tidak hanya terbentuk melalui mekanisme formal yang disediakan oleh sistem pemerintahan, tetapi juga berkembang melalui hubungan-hubungan lain yang terbentuk di luar jalur administratif. Dalam berbagai situasi, proses pembahasan kebijakan memperlihatkan adanya hubungan yang terjalin melalui jaringan personal, komunikasi informal, maupun kerja sama yang berkembang berdasarkan kepentingan tertentu. Keadaan tersebut menyebabkan proses pembentukan kebijakan sering kali memiliki lapisan hubungan yang jauh lebih luas dibandingkan dengan apa yang tampak dalam mekanisme formal.

Di dalam proses tersebut, sumber daya politik dan ekonomi menjadi unsur yang memiliki pengaruh besar terhadap arah regulasi yang akan dihasilkan. Sumber daya tersebut memberikan kemampuan bagi pihak tertentu untuk membangun pengaruh yang lebih besar dibandingkan aktor lainnya. Aktor yang memiliki posisi politik strategis serta dukungan ekonomi yang kuat

cenderung memiliki kapasitas lebih tinggi untuk memengaruhi pembahasan kebijakan karena mereka memiliki akses yang lebih luas terhadap proses pengambilan keputusan. Dukungan sumber daya memungkinkan mereka menjangkau berbagai saluran yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi dalam ruang kebijakan, baik melalui hubungan politik, akses informasi, maupun kemampuan membangun jaringan pengaruh.

Pengaruh sumber daya politik dan ekonomi tidak selalu muncul dalam bentuk yang terlihat secara langsung. Dalam banyak keadaan, pengaruh tersebut berkembang melalui hubungan yang berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Sumber daya ekonomi dapat memperkuat posisi politik, sementara kekuatan politik dapat membuka akses yang lebih besar terhadap berbagai peluang strategis. Hubungan semacam ini pada akhirnya menciptakan pola yang memungkinkan sebagian kelompok memiliki kemampuan lebih besar untuk mengarahkan pembahasan kebijakan sesuai

dengan kepentingan yang dimiliki. Sementara itu, kelompok yang tidak memiliki dukungan sumber daya yang setara sering menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pengaruh yang sama.

Pengaruh sumber daya politik dan ekonomi dalam proses pembentukan kebijakan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suatu pihak untuk memperoleh akses terhadap ruang pengambilan keputusan, tetapi juga berkaitan dengan bentuk pengaruh yang dapat dihasilkan terhadap arah regulasi yang sedang disusun. Perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh berbagai aktor dapat menciptakan variasi pengaruh dalam proses kebijakan, sehingga terdapat pihak-pihak tertentu yang memiliki peluang lebih besar untuk menempatkan kepentingannya dalam agenda pembahasan. Untuk memperjelas hubungan antara sumber daya yang dimiliki aktor dengan bentuk pengaruh yang muncul dalam proses kebijakan, uraian tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Bentuk Pengaruh Faktor Politik dan Ekonomi terhadap Arah Kebijakan Publik

Faktor yang Memengaruhi	Bentuk Pengaruh dalam Proses Kebijakan	Dampak terhadap Arah Kebijakan
Sumber daya politik	Memperluas akses terhadap pembuat keputusan	Meningkatkan kemampuan memengaruhi agenda kebijakan
Sumber daya ekonomi	Mendukung kapasitas aktor dalam memperkuat posisi kepentingan	Memperbesar peluang terakomodasinya kepentingan tertentu
Akses informasi	Memungkinkan penguasaan isu strategis dalam pembahasan kebijakan	Memengaruhi substansi regulasi yang disusun
Jaringan kekuasaan	Memperkuat hubungan antaraktor dalam proses kebijakan	Mempermudah pembentukan dukungan terhadap kebijakan
Kedekatan politik	Memperluas ruang komunikasi dengan pengambil keputusan	Meningkatkan peluang memperoleh pengaruh dalam perumusan kebijakan

Keadaan tersebut selanjutnya memengaruhi prioritas kepentingan dalam proses penyusunan kebijakan. Pada dasarnya, setiap kebijakan dibentuk melalui proses penentuan prioritas yang bertujuan untuk memilih isu mana yang dianggap lebih penting untuk didahulukan. Akan tetapi, penentuan prioritas tersebut tidak selalu berlangsung secara sepenuhnya netral. Dalam berbagai situasi, terdapat

kemungkinan bahwa isu tertentu memperoleh perhatian yang lebih besar dibandingkan isu lainnya karena adanya pengaruh dari pihak-pihak yang memiliki akses lebih kuat terhadap proses pengambilan keputusan. Hal ini menyebabkan kebijakan yang dihasilkan dapat menunjukkan kecenderungan tertentu dalam mengakomodasi

kepentingan yang dianggap memiliki posisi lebih penting dalam proses pembahasan.

Penentuan prioritas kepentingan juga memperlihatkan bahwa arah kebijakan sering kali dipengaruhi oleh kemampuan berbagai aktor dalam menempatkan kepentingannya sebagai agenda utama yang perlu diperhatikan oleh pembuat keputusan. Proses tersebut tidak hanya bergantung pada relevansi suatu isu terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan membangun dukungan serta memperluas pengaruh di dalam ruang kebijakan. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa beberapa isu memperoleh perhatian yang lebih besar bukan semata-mata karena tingkat urgensinya, melainkan karena adanya kelompok yang memiliki kemampuan lebih tinggi dalam memperjuangkan isu tersebut.

Persoalan tersebut kemudian berkaitan dengan hubungan antara kebutuhan publik dan kepentingan kelompok tertentu dalam proses penyusunan kebijakan. Pada tingkat ideal, kebijakan publik diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat secara luas sehingga mampu menghasilkan manfaat yang merata. Akan tetapi, dalam praktiknya sering muncul kondisi ketika kebutuhan masyarakat harus berhadapan dengan berbagai kepentingan lain yang juga berusaha memperoleh tempat dalam proses kebijakan. Situasi ini menciptakan hubungan yang tidak selalu berjalan secara seimbang karena terdapat pihak yang memiliki kemampuan lebih besar dalam memengaruhi arah keputusan.

Hubungan antara kebutuhan publik dan kepentingan kelompok tertentu menjadi semakin kompleks ketika kelompok yang memiliki akses kuat terhadap proses kebijakan berada pada posisi yang memungkinkan untuk menentukan arah pembahasan. Dalam kondisi seperti ini, terdapat kemungkinan bahwa kebutuhan masyarakat secara luas tidak memperoleh ruang yang sama besar dibandingkan kepentingan kelompok tertentu yang memiliki kapasitas pengaruh lebih tinggi. Keadaan tersebut dapat menimbulkan persepsi bahwa kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat, melainkan juga

dipengaruhi oleh pertimbangan lain yang berkembang di luar kepentingan publik.

Selain itu, pengaruh jaringan kekuasaan terhadap keputusan kebijakan juga menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembentukan regulasi. Jaringan kekuasaan terbentuk melalui hubungan yang berkembang di antara berbagai aktor yang memiliki posisi strategis dalam sistem politik maupun ekonomi. Hubungan tersebut dapat berkembang melalui kedekatan politik, hubungan profesional, pengalaman kerja, ataupun keterikatan kepentingan yang telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Jaringan semacam ini menciptakan saluran pengaruh yang dapat digunakan untuk memperkuat posisi pihak tertentu dalam proses kebijakan.

Keberadaan jaringan kekuasaan sering kali menghasilkan hubungan yang memungkinkan pertukaran dukungan antarpihak dalam berbagai proses pengambilan keputusan. Melalui jaringan tersebut, berbagai aktor dapat memperoleh akses terhadap informasi, kesempatan untuk terlibat dalam pembahasan kebijakan, maupun peluang untuk memperkuat posisi dalam ruang pengambilan keputusan. Situasi demikian memperlihatkan bahwa arah kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh prosedur formal yang berlaku, tetapi juga oleh hubungan-hubungan yang berkembang melalui jaringan pengaruh di antara para aktor.

Di sisi lain, keberadaan jaringan kekuasaan juga memiliki hubungan dengan ketimpangan akses dalam proses perumusan regulasi. Tidak seluruh kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki ruang pembentukan kebijakan. Sebagian kelompok memiliki jalur yang lebih mudah untuk berkomunikasi dengan pembuat keputusan, sementara kelompok lainnya menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh akses serupa. Perbedaan tersebut menciptakan situasi di mana kemampuan untuk memengaruhi kebijakan tidak tersebar secara merata di antara seluruh pihak yang berkepentingan.

Ketimpangan akses tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh posisi formal seseorang atau kelompok, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain seperti sumber daya ekonomi, kedekatan politik, jaringan sosial,

serta kemampuan mengelola hubungan dengan pihak yang memiliki kewenangan. Kelompok dengan kapasitas yang lebih besar cenderung memiliki peluang yang lebih luas untuk menyampaikan kepentingannya secara langsung kepada pembuat kebijakan. Sebaliknya, kelompok dengan sumber daya yang terbatas sering kali hanya berada pada posisi yang menerima dampak dari keputusan yang telah dihasilkan tanpa memiliki kemampuan yang cukup untuk memengaruhi proses sebelumnya.

Konflik Kepentingan dalam Proses Penyusunan Regulasi

Proses pembentukan regulasi di Indonesia memperlihatkan adanya pertemuan berbagai kepentingan yang sering kali menimbulkan perbedaan arah tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan kebijakan. Konflik kepentingan dalam proses penyusunan regulasi menjadi salah satu persoalan yang memperoleh perhatian dalam pembahasan mengenai kebijakan publik karena proses pembentukan suatu aturan pada dasarnya tidak berlangsung dalam ruang yang sepenuhnya bebas dari pengaruh berbagai kepentingan. Penyusunan regulasi melibatkan banyak pihak dengan tujuan, kebutuhan, serta orientasi yang tidak selalu sejalan satu sama lain. Keadaan tersebut menyebabkan proses pembentukan kebijakan berkembang sebagai ruang interaksi yang mempertemukan berbagai kepentingan yang saling berupaya memperoleh pengaruh terhadap arah keputusan yang akan dihasilkan. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, regulasi tidak hanya dipandang sebagai hasil akhir dari suatu prosedur administratif, tetapi juga sebagai produk dari hubungan yang terbentuk di antara berbagai aktor yang memiliki kapasitas berbeda dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan.

Proses penyusunan regulasi pada dasarnya selalu dihadapkan pada kondisi di mana berbagai kepentingan hadir secara bersamaan dalam satu ruang kebijakan. Setiap aktor yang terlibat memasuki proses tersebut dengan tujuan yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan kepentingan yang dimiliki. Sebagian pihak berupaya

mendorong terciptanya kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas, sementara pihak lainnya memiliki orientasi yang berkaitan dengan kepentingan institusional, kepentingan politik, ataupun kepentingan yang berhubungan dengan posisi tertentu. Keberagaman tujuan tersebut menyebabkan proses penyusunan kebijakan tidak hanya menjadi ruang pembahasan mengenai substansi aturan, tetapi juga menjadi arena pertemuan berbagai kepentingan yang saling memengaruhi.

Persinggungan berbagai kepentingan dalam proses kebijakan merupakan kondisi yang sulit untuk dihindari mengingat setiap kebijakan pada umumnya memiliki konsekuensi yang luas terhadap berbagai pihak. Ketika suatu regulasi disusun, terdapat kemungkinan bahwa kebijakan tersebut akan memberikan manfaat bagi sebagian kelompok dan pada saat yang sama menimbulkan konsekuensi tertentu bagi kelompok lainnya. Situasi seperti ini menyebabkan berbagai pihak berupaya memperjuangkan kepentingannya agar memperoleh ruang yang lebih besar dalam proses pembahasan. Akibatnya, proses kebijakan berkembang tidak hanya sebagai mekanisme penyusunan aturan, tetapi juga sebagai proses negosiasi yang memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan di antara para aktor yang terlibat.

Persinggungan kepentingan tersebut sering kali menghasilkan hubungan yang kompleks karena setiap aktor memiliki strategi yang berbeda dalam memperjuangkan tujuan yang dimiliki. Sebagian pihak berupaya membangun dukungan melalui jalur formal yang tersedia, sedangkan sebagian lainnya mengembangkan hubungan melalui pendekatan yang lebih informal. Perbedaan cara tersebut memperlihatkan bahwa proses pembentukan regulasi tidak selalu berlangsung melalui mekanisme yang sepenuhnya terlihat secara administratif. Di balik prosedur resmi yang berjalan, terdapat hubungan-hubungan lain yang berkembang melalui komunikasi, pertukaran kepentingan, maupun pembentukan jaringan pengaruh yang bertujuan untuk memperkuat posisi masing-masing pihak.

Kondisi tersebut kemudian berkaitan dengan bentuk keterkaitan antaraktor dalam penyusunan regulasi. Hubungan antaraktor dalam proses kebijakan pada dasarnya tidak terbentuk secara sederhana, melainkan berkembang melalui pola yang saling berhubungan dan memiliki tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Keterkaitan tersebut dapat muncul melalui hubungan politik, kerja sama institusional, hubungan ekonomi, kedekatan sosial, maupun jaringan yang telah terbentuk dalam waktu yang cukup lama. Berbagai hubungan tersebut pada akhirnya membentuk pola interaksi yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, dukungan, serta penguatan posisi dalam proses pengambilan keputusan.

Hubungan antarpihak yang berkembang dalam proses penyusunan regulasi juga menunjukkan bahwa keputusan kebijakan tidak selalu dihasilkan melalui proses yang berdiri sendiri. Setiap keputusan sering kali dipengaruhi oleh hubungan yang telah terbentuk sebelumnya di antara para aktor yang terlibat. Kedekatan hubungan tertentu dapat menciptakan ruang komunikasi yang lebih luas dibandingkan pihak lain yang tidak memiliki akses serupa. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa sebagian kelompok memperoleh kesempatan yang lebih besar untuk menyampaikan kepentingannya secara langsung dalam proses penyusunan regulasi.

Keterkaitan yang berkembang di antara berbagai aktor tersebut pada akhirnya dapat memunculkan potensi keberpihakan dalam proses pengambilan keputusan. Keberpihakan tersebut tidak selalu muncul dalam bentuk yang terlihat secara langsung ataupun dinyatakan secara terbuka. Dalam banyak situasi, keberpihakan dapat berkembang secara bertahap melalui hubungan yang berlangsung secara terus-menerus antara pembuat keputusan dan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan yang sedang dibahas. Hubungan yang terjalin dalam waktu yang panjang dapat menciptakan kedekatan tertentu yang pada akhirnya memengaruhi cara pandang terhadap isu yang sedang dibahas.

Potensi keberpihakan dalam pengambilan keputusan menjadi persoalan yang penting untuk diperhatikan karena

dapat memengaruhi arah kebijakan yang dihasilkan. Ketika suatu keputusan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu dibandingkan pertimbangan yang lebih luas, maka terdapat kemungkinan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Keadaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan isi kebijakan, tetapi juga menyangkut persepsi masyarakat terhadap proses yang melahirkan kebijakan tersebut. Apabila masyarakat menilai bahwa keputusan lebih mengakomodasi kepentingan kelompok tertentu, maka tingkat kepercayaan terhadap institusi yang menghasilkan kebijakan dapat mengalami penurunan.

Persoalan tersebut kemudian membawa perhatian pada posisi kepentingan publik di tengah berbagai kepentingan yang saling bersaing dalam proses penyusunan regulasi. Pada dasarnya, regulasi dibentuk untuk mendukung pelaksanaan berbagai kebutuhan masyarakat dan menciptakan tata kelola yang lebih baik. Akan tetapi, ketika ruang kebijakan dipenuhi oleh berbagai kepentingan yang berupaya memperoleh pengaruh, kepentingan publik sering kali berada pada posisi yang menghadapi berbagai tantangan. Kepentingan masyarakat secara luas tidak selalu memiliki kemampuan yang sama untuk memperjuangkan aspirasinya dibandingkan kelompok tertentu yang memiliki sumber daya lebih besar.

Posisi kepentingan publik menjadi semakin kompleks ketika berbagai pihak yang terlibat dalam proses kebijakan memiliki tingkat pengaruh yang berbeda. Kelompok yang memiliki akses kuat terhadap ruang pengambilan keputusan sering kali berada pada posisi yang lebih menguntungkan karena mampu menyampaikan kepentingannya secara lebih langsung dan berkelanjutan. Sebaliknya, masyarakat secara umum sering berada pada posisi yang lebih jauh dari pusat-pusat pengambilan keputusan sehingga keterlibatannya lebih terbatas. Situasi demikian dapat menyebabkan kebutuhan masyarakat yang lebih luas menghadapi kesulitan untuk memperoleh perhatian yang setara dalam proses pembentukan regulasi.

Selain berkaitan dengan posisi kepentingan publik, proses penyusunan regulasi juga menghadapi tantangan yang berhubungan dengan keterbukaan. Keterbukaan dalam proses pembentukan kebijakan menjadi salah satu unsur yang penting karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk mengetahui bagaimana suatu keputusan disusun serta siapa saja pihak yang terlibat di dalamnya. Akan tetapi, pelaksanaan proses yang terbuka tidak selalu berlangsung secara optimal. Dalam beberapa keadaan, terdapat bagian tertentu dari proses penyusunan regulasi yang tidak sepenuhnya dapat diakses oleh masyarakat sehingga menimbulkan keterbatasan dalam pengawasan publik.

Tantangan terhadap keterbukaan proses penyusunan regulasi tidak hanya berkaitan dengan akses informasi, tetapi juga berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk memahami berbagai proses yang berlangsung di balik pembentukan kebijakan. Informasi yang tersedia sering kali hanya memperlihatkan tahapan formal dari suatu kebijakan, sementara hubungan-hubungan yang berkembang di luar mekanisme administratif tidak selalu dapat diamati secara langsung. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat mengalami keterbatasan dalam memahami keseluruhan proses yang memengaruhi lahirnya suatu regulasi.

Persoalan lain yang memiliki hubungan erat dengan konflik kepentingan dalam penyusunan regulasi adalah pengaruh hubungan politik terhadap arah kebijakan yang dihasilkan. Hubungan politik pada dasarnya memiliki peranan yang cukup besar dalam menentukan bagaimana suatu kebijakan dibahas dan diarahkan. Hubungan tersebut dapat berkembang melalui kedekatan antarpihak, dukungan politik, maupun jaringan kekuasaan yang telah terbentuk dalam struktur pemerintahan dan kehidupan politik secara lebih luas.

Pengaruh hubungan politik tersebut dapat menciptakan kondisi di mana proses penyusunan regulasi tidak hanya dipengaruhi oleh kebutuhan kebijakan itu sendiri, tetapi juga oleh pertimbangan yang berkaitan dengan hubungan antarpihak yang terlibat. Keputusan yang dihasilkan

dapat dipengaruhi oleh berbagai bentuk pertukaran dukungan maupun upaya mempertahankan posisi dalam struktur kekuasaan. Keadaan demikian memperlihatkan bahwa hubungan politik sering kali menjadi bagian yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap arah regulasi yang pada akhirnya ditetapkan.

Implikasi Relasi Kekuasaan terhadap Tata Kelola Pemerintahan dan Kepentingan Publik

Relasi kekuasaan dalam proses pembentukan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan memiliki pengaruh yang luas terhadap berbagai aspek tata kelola negara, terutama dalam menentukan arah kebijakan yang akan dihasilkan serta konsekuensi yang muncul dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam sistem pemerintahan, proses pengambilan keputusan tidak berlangsung dalam ruang yang terpisah dari hubungan antarpihak yang memiliki kepentingan dan tingkat pengaruh yang berbeda-beda. Keberadaan berbagai aktor dengan kapasitas yang tidak sama dalam menjangkau proses kebijakan menciptakan pola hubungan tertentu yang pada akhirnya dapat memengaruhi penyelenggaraan pemerintahan secara lebih luas. Oleh karena itu, pembahasan mengenai relasi kekuasaan tidak hanya berkaitan dengan persoalan distribusi pengaruh dalam proses pengambilan keputusan, tetapi juga berkaitan dengan berbagai dampak yang ditimbulkan terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan posisi kepentingan publik dalam keseluruhan proses tersebut.

Salah satu implikasi yang paling terlihat dari relasi kekuasaan dalam proses kebijakan berkaitan dengan kualitas regulasi yang dihasilkan. Regulasi pada dasarnya dibentuk untuk menciptakan pedoman yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan, mengatur hubungan sosial, serta menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Namun demikian, kualitas suatu regulasi tidak hanya ditentukan oleh kelengkapan prosedur administratif dalam proses penyusunannya, tetapi juga dipengaruhi oleh hubungan yang berkembang di antara berbagai aktor yang terlibat. Ketika proses penyusunan regulasi berlangsung dalam kondisi di mana terdapat

ketimpangan pengaruh antarpihak, maka terdapat kemungkinan bahwa substansi kebijakan yang dihasilkan lebih mencerminkan kepentingan tertentu dibandingkan kebutuhan yang lebih luas.

Kualitas regulasi memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan suatu kebijakan dalam memberikan manfaat yang merata serta menjawab berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Apabila proses pembentukan kebijakan dipengaruhi secara kuat oleh kelompok tertentu yang memiliki akses besar terhadap ruang pengambilan keputusan, maka terdapat kemungkinan bahwa kebijakan yang dihasilkan akan lebih banyak mempertimbangkan kepentingan pihak tersebut. Dalam situasi demikian, regulasi dapat kehilangan kemampuan untuk mengakomodasi kebutuhan yang lebih beragam karena proses penyusunannya tidak berlangsung dalam kondisi yang seimbang. Dampaknya tidak hanya terlihat pada substansi aturan yang dihasilkan, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam jangka panjang.

Permasalahan mengenai kualitas regulasi selanjutnya memiliki hubungan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Kepercayaan masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena menjadi dasar bagi terbentuknya legitimasi terhadap berbagai kebijakan yang dihasilkan. Hubungan antara negara dan masyarakat tidak hanya dibangun melalui kewenangan formal yang dimiliki institusi pemerintahan, tetapi juga melalui keyakinan masyarakat bahwa keputusan yang dihasilkan negara disusun untuk memenuhi kebutuhan publik secara lebih luas. Dalam kondisi seperti ini, cara suatu kebijakan dibentuk sering kali menjadi perhatian yang sama pentingnya dengan hasil akhir dari kebijakan tersebut.

Masyarakat pada umumnya tidak hanya menilai efektivitas suatu kebijakan dari dampak yang ditimbulkan, tetapi juga memperhatikan proses yang melatarbelakangi pembentukannya. Ketika muncul anggapan bahwa proses pengambilan keputusan lebih dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan tertentu dibandingkan pertimbangan kepentingan

masyarakat, maka tingkat kepercayaan terhadap institusi negara dapat mengalami penurunan. Penurunan kepercayaan tersebut dapat muncul karena masyarakat memandang bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tujuan penyelenggaraan pemerintahan dengan praktik yang berlangsung dalam proses pembentukan kebijakan. Apabila kondisi semacam ini terjadi secara berulang, maka hubungan antara masyarakat dan institusi negara dapat menjadi semakin jauh.

Kepercayaan publik yang mengalami penurunan juga dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan berbagai program pemerintahan. Kebijakan yang secara substansi memiliki tujuan yang baik sekalipun dapat menghadapi berbagai hambatan apabila masyarakat tidak memiliki keyakinan terhadap proses yang melahirkannya. Dalam situasi seperti ini, legitimasi kebijakan menjadi tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal institusi negara, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat terhadap proses dan hasil kebijakan tersebut. Oleh karena itu, relasi kekuasaan yang berkembang dalam proses pembentukan kebijakan memiliki pengaruh yang tidak langsung terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

Persoalan tersebut kemudian berkaitan dengan hubungan antara kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat luas. Pada dasarnya, kebijakan publik dibentuk sebagai instrumen yang digunakan untuk menjawab berbagai kebutuhan sosial serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya hubungan antara kebijakan yang dihasilkan dengan kebutuhan masyarakat tidak selalu berjalan secara seimbang. Terdapat situasi ketika arah kebijakan lebih dipengaruhi oleh pertimbangan tertentu yang berkembang dalam proses pengambilan keputusan sehingga kebutuhan masyarakat secara luas tidak memperoleh perhatian yang setara.

Hubungan antara kebijakan publik dan kebutuhan masyarakat menjadi semakin kompleks ketika proses penyusunannya dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas antaraktor dalam mengakses ruang kebijakan. Kelompok yang memiliki sumber

daya besar cenderung memiliki peluang lebih luas untuk menyampaikan kepentingannya kepada pembuat keputusan. Sebaliknya, masyarakat secara umum sering kali berada pada posisi yang lebih jauh dari pusat-pusat pengambilan keputusan sehingga keterlibatannya menjadi lebih terbatas. Kondisi demikian dapat menciptakan situasi di mana kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, tetapi juga dipengaruhi oleh kepentingan pihak tertentu yang memiliki pengaruh lebih besar.

Selain memengaruhi hubungan antara kebijakan dan kebutuhan masyarakat, relasi kekuasaan juga memiliki implikasi terhadap pelaksanaan prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan. Akuntabilitas memiliki peranan penting dalam memastikan bahwa setiap proses pengambilan keputusan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip tersebut berkaitan dengan keterbukaan proses, kejelasan tanggung jawab, serta kemampuan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap berbagai keputusan yang diambil oleh pemerintah.

Pelaksanaan prinsip akuntabilitas sering kali menghadapi berbagai tantangan ketika proses kebijakan dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan yang berkembang di luar mekanisme formal. Hubungan yang terbentuk melalui jaringan tertentu dapat menciptakan kondisi di mana sebagian proses pengambilan keputusan berlangsung di luar ruang yang dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat. Keadaan semacam ini menyebabkan proses pengawasan menjadi lebih sulit dilakukan karena tidak seluruh hubungan yang memengaruhi kebijakan dapat terlihat secara terbuka. Akibatnya, terdapat kemungkinan bahwa pertanggungjawaban terhadap keputusan yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

Persoalan lain yang memiliki hubungan erat dengan relasi kekuasaan berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan. Partisipasi masyarakat merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memungkinkan berbagai aspirasi publik

dapat disampaikan dalam proses pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat tidak hanya memberikan ruang bagi penyampaian kebutuhan yang berkembang di tingkat sosial, tetapi juga dapat memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat sering kali dipengaruhi oleh kondisi yang berkembang dalam proses kebijakan itu sendiri. Ketika masyarakat memandang bahwa ruang partisipasi yang tersedia tidak memberikan pengaruh yang cukup terhadap keputusan yang akan dihasilkan, maka keterlibatan dalam proses tersebut dapat mengalami penurunan. Masyarakat dapat memunculkan anggapan bahwa keputusan yang dihasilkan telah ditentukan sebelumnya oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki pengaruh lebih besar sehingga partisipasi yang dilakukan dianggap tidak memberikan perubahan yang berarti. Situasi tersebut dapat menciptakan jarak yang semakin besar antara masyarakat dan proses penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam jangka yang lebih luas, berbagai persoalan tersebut juga memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan arah pembangunan jangka panjang. Pemerintahan yang dihadapkan pada ketimpangan pengaruh dalam proses kebijakan berpotensi mengalami kesulitan dalam mewujudkan kebijakan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Kebijakan yang tidak disusun berdasarkan pertimbangan yang seimbang dapat menghasilkan pelaksanaan program yang kurang efektif karena tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, pembangunan jangka panjang memerlukan konsistensi kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan berbagai sektor secara berkelanjutan. Ketika arah kebijakan lebih dipengaruhi oleh kepentingan jangka pendek atau kepentingan kelompok tertentu, maka terdapat kemungkinan bahwa pembangunan yang dijalankan menjadi kurang mampu menghasilkan manfaat yang merata. Keadaan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pembangunan karena program yang dijalankan lebih

banyak diarahkan pada kepentingan tertentu dibandingkan kebutuhan masyarakat secara lebih luas.

KESIMPULAN

Proses pembentukan regulasi publik di Indonesia menunjukkan bahwa kebijakan tidak terbentuk semata-mata melalui mekanisme administratif dan prosedur formal yang telah ditetapkan dalam sistem pemerintahan. Di dalam proses tersebut terdapat relasi kekuasaan yang melibatkan berbagai aktor dengan tingkat pengaruh, akses, serta kapasitas yang berbeda dalam memengaruhi arah kebijakan. Hubungan antara aktor politik, kelompok kepentingan, dan berbagai pihak lain membentuk pola interaksi yang kompleks dalam proses penyusunan regulasi. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa proses kebijakan berkembang sebagai ruang yang mempertemukan berbagai kepentingan yang saling berupaya memperoleh pengaruh terhadap keputusan yang dihasilkan. Perbedaan distribusi sumber daya politik, ekonomi, serta jaringan hubungan yang dimiliki masing-masing pihak kemudian menciptakan ketidakseimbangan dalam kemampuan untuk menjangkau ruang pengambilan keputusan. Konflik kepentingan dalam penyusunan regulasi memiliki hubungan yang erat dengan pola relasi kekuasaan yang berkembang di dalam sistem politik. Persinggungan berbagai kepentingan, keterkaitan antarpihak, serta pengaruh hubungan politik terhadap proses kebijakan dapat memunculkan kondisi di mana arah kebijakan tidak sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara luas. Situasi tersebut dapat memengaruhi kualitas regulasi yang dihasilkan serta menimbulkan tantangan terhadap keterbukaan, akuntabilitas, dan posisi kepentingan publik dalam proses pembentukan kebijakan. Ketika pengaruh kelompok tertentu menjadi lebih dominan dibandingkan kepentingan masyarakat secara umum, maka muncul potensi terjadinya ketidakseimbangan dalam proses penyusunan kebijakan. Pada akhirnya, relasi kekuasaan yang berkembang dalam proses pembentukan regulasi tidak hanya berpengaruh terhadap substansi kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga memiliki

konsekuensi yang lebih luas terhadap tata kelola pemerintahan dan pembangunan jangka panjang. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara, partisipasi publik dalam proses kebijakan, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat dipengaruhi oleh bagaimana kebijakan tersebut dibentuk. Oleh karena itu, proses pembentukan regulasi perlu diarahkan pada mekanisme yang lebih terbuka, akuntabel, serta mampu memberikan ruang yang lebih seimbang bagi berbagai kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan dapat lebih mencerminkan kebutuhan masyarakat secara luas dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, L., & Rery, S. (2020). Subjektivitas Kekuasaan Dalam Pemberitaan Media Online. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 24(1), 17-36.
- Aliano, Y. A., & Adon, M. J. (2023). Percaturan politik geneologi kekuasaan dalam sistem pemilu '2024' Di Indonesia perspektif etika Michel Foucault. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6(3), 474-486.
- Bakker, F. F., Imigrasi, P., & Prasetyo, D. E. (2021). Pluralisme Kewenangan Penyidikan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 10(1).
- Cahyono, S. P., Setyawarni, T., Muyana, A. I., & Bayu, A. A. (2023). Hubungan Hukum Dan Kekuasaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 6(1), 23-48.
- Ericson, R. J. (2022). Sanksi Administrasi Terhadap Aparatur Sipil Negara Dalam Kegiatan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah. *Jurnal Hukum Positum*, 7(1), 171-189.
- Harinurdin, E., & Safitri, K. A. (2023). Tata kelola perusahaan tercatat di Indonesia. *Jurnal Vosasi Indonesia*, 10(1), 46-56.
- Hermanto, B. (2023). Dinamika partisipasi publik dalam mewujudkan legislasi yang partisipatoris. *Jurnal Yudisial*, 16(2), 205-231.
- Indriastuti, I. (2020). Memahami Kembali Pelayanan Publik untuk Mewujudkan

- Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance). *Governance, JKMP (Governance, Jurnal Kebijakan & Manajemen Publik)*, 10(1), 60-75.
- Jumadin, Z., & Wibisono, Y. (2019). Konflik politik antara gubernur dan dprd DKI Jakarta dalam proses penetapan APBD 2015. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4(2), 249-303.
- Mandasari, N. (2023). Perbandingan Konsep Tata Kelola Pemerintah: sound governance, dynamic governance, dan open government. *Ebisma (Economics, Business, Management, & Accounting Journal)*, 3(1), 46-62.
- Nafis, S. (2020). Pencegahan Dan Penindakan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Yang Kemudian Dirubah Oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dan Undang Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Studi Kasus Nomor Perkara 67/Pid. Sus-TPK/2018/PN Bdg). *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 10(1), 39-64.
- Noor, M. U. (2019). Inisiasi masyarakat informasi di Indonesia melalui implementasi keterbukaan informasi publik: Satu dekade Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. *Khizanah al-Hikmah Jurnal Ilmu Perpustakaan Informasi dan Kearsipan*.
- Nugroho, Y., Ermawati, N., & Suhardianto, N. (2023). Pelaporan Environment Social Governance (ESG) dari Sudut Pandang Filsafat Jawa Berdimensi "Hamemayu Hayuning Bawana". *Akuntansi: Jurnal Akuntansi Integratif*, 9(1), 1-18.
- Padilah, A. H., Fayuni, D. F., & Nurviyanti, M. D. (2023). Partisipasi politik dalam pembangunan desa di kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. *Journal of Social and Policy Issues*, 192-201.
- Pulungan, R. A. R., & Alw, L. T. (2022). Mekanisme Pelaksanaan Prinsip Checks and Balances Antara Lembaga Legislatif Dan Eksekutif Dalam Pembentukan Undang-Undang Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 280-293.
- Puspitasari, D., & Ruwaida, I. (2021). Relasi sosial agen-struktur dalam gerakan koalisi masyarakat sipil anti kekerasan seksual pendukung pengesahan RUU-PKS. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(1), 665-681.
- Putra, A. (2020). Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 1-10.
- Rahim, R. K. R., Mulanda, D. M., Arischa, K. L. A., Frinaldi, A. F., Syamsir, S., & Putri, N. E. P. (2023). Membangun Masyarakat Partisipatif Dengan Aplikasi Pintar di Era Kebijakan Publik. *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 8(2), 1-14.
- Rini, Y. T. (2019). Mengurai peta jalan akuntansi era industri 4.0. *Jurnal Referensi: Ilmu Manajemen dan Akutansi*, 7(1), 58-68.
- Rosmidah, R., Hosen, M., & Sasmiar, S. (2023). Penataan struktur hukum hak atas tanah dalam rangka keadilan dan investasi. *Recital Review*, 5(2), 209-244.
- Rukin, S. P. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Saputra, K. A. K., Juniariani, N. M. R., & Jayawarsa, A. K. (2019). Conflict of interest dan independensi auditor pada kantor akuntan publik di Bali. *InFestasi*, 15(1), 1-9.
- Septiana, A. R., Bormasa, M. F., Alasan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., ... & Seran, D. A. N. (2023). Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi. *Global Eksekutif Teknologi*.
- Sukmayana, D. (2023). Analisis potensi pasar global bagi produk kehutanan: Peluang dan tantangan bagi pengusaha bisnis kayu dan hasil hutan lainnya. *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 274-285.
- Syahrul, F. (2020). Potret Kekuatan Multikulturalisme dalam Institusi Politik. *Journal Publicuho*, 3(1), 21-37.